

POLA KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA* DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK



Tesis

Afifah Rahmi Andini

30000117410002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEORO
SEMARANG
2019**

POLA KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA* DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK



Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Ilmu Lingkungan**

Afifah Rahmi Andini

30000117410002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEORO
SEMARANG
2019**

TESIS

POLA KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA* DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK

Disusun Oleh

Afifah Rahmi Andini
30000117410002

Mengetahui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing

Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, M.PA
NIP 19611202 198803 2 002

Dekan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan
Universitas Diponegoro

Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP 19670101 199103 1 005

Dr. Eng. Maryono, S.T., M.T.
NIP 19750811 200012 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

POLA KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA* DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK

Disusun Oleh

Afifah Rahmi Andini
30000117410002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

Dr. Eng. Maryono S.T, M.T

.....

Anggota

1. Dr. Drs. Amirudin, M.Si.

.....

2. Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, M.PA

.....

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Studi Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semarang, November 2019

Afifah Rahmi Andini

RIWAYAT HIDUP



Afifah Rahmi Andini lahir di Wonogiri – Jawa Tengah pada tanggal 06 September 1994, sebagai putri pertama dari pasangan Bapak Samijan Hadisiswoyo dan Ibu Wahyuningsih. Pendidikan dasar ditempuh di SD Islam Istiqomah (2001-2007), kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Ungaran (2007-2009) dan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Ungaran (2009-2011).

Gelar kesarjanaan Strata 1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro diraih pada tahun 2016. Pada tahun 2017 Penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat,rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memenuhi pendidikan Strata 2 Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

Latar belakang studi penulis sebagai akademisi Ilmu Hubungan Internasional dan kecintaan penulis terhadap isu lingkungan hidup adalah hal yang mendorong penulis menyuntesis dengan judul: “Pola Kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok” Penulis berharap bahwa isu lingkungan hidup memiliki tempat yang sama dengan isu tradisional di mata aktor hubungan internasional. Sehingga, tujuan konservasi lingkungan hidup global guna menciptakan tatanan internasional yang lebih baik dalam bidang lingkungan hidup lebih mudah tercapai.

Kemudian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua inspirasi, motivasi, dukungan, dan bantuan yang diberikan selama penyusunan tesis ini hingga selesai. Secara khusus, rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada

1. Kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi.

2. Dr. Eng, Maryono, S.T., MT., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis untuk tidak pernah berhenti menggali dan mengembangkan potensi diri;
3. Prof. Dr. Hadiyanto, S.T, M.Sc., selaku Wakil Dekan I sekaligus mantan Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro yang senantiasa memberikan arahan dan bantuan selama menempuh masa perkuliahan;
4. Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, M.P.A., selaku Dosen Pembimbing yang tidak hanya memberikan ilmu dan motivasi akademik, melainkan lebih dari itu, Beliau telah menjadi *role model* bagi penulis dalam memahami definisi dan peran sebagai seorang “wanita”;
5. Dr. Drs, Amirudin, M.Si, selaku Dosen Penguji atas masukan dan saran dalam penyusunan tesis;
6. Segenap dosen dan staf pengelola Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, WWF Indonesia dan WCS Indonesia Program selaku narasumber penelitian yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna menunjang penelitian ini;
8. Rekan-rekan Magister Ilmu Lingkungan angkatan 52 dan 53 atas dukungan, kepercayaan dan warna yang telah ditorehkan selama masa perkuliahan ini;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa ada ketidaksempurnaan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat positif dari semua pihak. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat dan berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya pengendalian kejahatan terhadap lingkungan, khususnya dalam isu perdagangan flora dan fauna dilindungi.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Teori Kepatuhan.....	14
2.1.1 Teori Kepatuhan Ronald B Mitchell.....	16
2.1.2 Teori Kepatuhan Abraham Chayes.....	20
2.2 Analisis SWOT	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Variabel Penelitian	28
3.4 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep	29

3.5	Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian.....	30
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Gambaran Umum.....	39
4.1.1	Perdagangan Ilegal Trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok (Tahun 2015 – 2018).....	39
4.1.1.1	Populasi dan Ancaman Perdagangan Trenggiling di Indonesia	39
4.1.1.2	Keterlibatan Tiongkok dalam Tingginya Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia	42
4.1.1.3	Modus Operandi Perdagangan Trenggiling di Indonesia	47
4.1.2	Komitmen Indonesia dan Tiongkok dalam <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna</i> (CITES)	49
4.1.1.1	CITES.....	49
4.1.1.2	Posisi Indonesia dan Tiongkok terhadap CITES....	54
4.2	Bentuk Pola Kepatuhan Indonesia terhadap CITES dan Faktor Terbentuknya Pola Kepatuhan	67
4.2.1	Pola Kepatuhan Indonesia terhadap CITES	67
4.2.1.1	Pola <i>Low Compliance</i> terhadap CITES.....	67
4.2.1.2	Pola <i>Low Effectiveness</i>	69
4.2.1.3	<i>Low Compliance-Low Effectiveness</i>	71
4.2.2	Penyebab Terbentuknya Pola <i>Low Compliance-Low Effectiveness</i>	72
4.2.2.1	Analisa Kepatuhan Berdasarkan Teori Ronald B. Mitchell.....	72
4.2.2.2	Analisa Kepatuhan Berdasarkan Teori Abraham Chayes	79

4.3 Usulan Strategi Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling melalui Skema Kerjasama CITES.....	87
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penggolongan Proyek Legislasi Nasional CITES	4
Tabel 1.2	Perbandingan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1	Perbandingan Teori Kepatuhan Menurut Para Ahli.....	14
Tabel 3.1	Daftar Narasumber Wawancara Penelitian	32
Tabel 3.2	Daftar Variabel Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jenis Data Serta Instrumen yang Digunakan dalam Penelitian	36
Tabel 4.1	Nilai Ekonomi Trenggiling	48
Tabel 4.2	Kategori dalam Appendix CITES	52
Tabel 4.3	Perbandingan Posisi Indonesia dan Tiongkok terhadap CITES	67
Tabel 4.4	Daftar Temuan Kasus Perdagangan Ilegal Trenggiling menuju Tiongkok tahun 2015-2018.....	69
Tabel 4.4	<i>Internal Strategic Factor Summary (IFAS)</i>	91
Tabel 4.5	<i>Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)</i>	93
Tabel 4.6	Matriks SWOT	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pola Persebaran Perdagangan Trenggiling Ilegal di Kawasan Asia Tahun 2010 - 2016	6
Gambar 2.1	Kuadran Kepatuhan dengan Efektifitas	18
Gambar 4.1	Trenggiling Jawa	41
Gambar 4.3	Produk Olahan Trenggiling di Tiongkok	45
Gambar 4.4	Pelaku Perdagangan Ilegal Trenggiling	50
Gambar 4.5	Alur Perdagangan Trenggiling di Indonesia	51
Gambar 4.6	Struktur Organisasi CITES	54
Gambar 4.7	Skema Institusional Implementasi CITES di Indonesia.....	60
Gambar 4.8	Pemusnahan Barang Bukti Trenggiling pada Temuan Kasus di Medan Tahun 2015	62
Gambar 4.9	Program Kampanye Penghentian Konsumsi Trenggiling di Tiongkok	66
Gambar 4.10	Kuadran Hubungan Kepatuhan dan Efektifitas dalam Kasus Perdagangan Ilegal Trenggiling Indonesia tahun 2015 hingga 2018.....	73

ABSTRAK

Indonesia merupakan rumah bagi salah satu jenis spesies trenggiling dunia yang statusnya dilindungi secara internasional dalam kategori daftar merah IUCN. Artinya, trenggiling masuk ke dalam kategori rentan terhadap kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan secara bebas. Namun, jumlah populasi trenggiling di Indonesia kian menurun akibat ancaman perburuan dan perdagangan ilegal. Dalam langkah merespon ancaman kepunahan trenggiling di Indonesia, Indonesia meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Sayangnya, meski telah diratifikasi dan diimplementasikan di Indonesia, fakta lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2018 aliran perdagangan ilegal trenggiling masih terjadi antara Indonesia menuju Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kepatuhan Indonesia terhadap CITES dalam menangani kasus perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok. Untuk itu, peneliti menggunakan tipe eksplanatif dalam metode kualitatif dan menggunakan analisa Teori Kepatuhan Robert M. Mitchell dan Abraham Chayes. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kondisi perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pola *low compliance* dan *low effectiveness*. Pola tersebut terbentuk karena faktor internal yang mencakup keterbatasan negara dalam menguatkan peraturan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparatur negara dan keterbatasan sumber daya peralatan untuk memantau dan mengidentifikasi temuan perdagangan ilegal trenggiling. Selain itu juga terdapat faktor eksternal yang mencakup ambiguitas dalam konvensi CITES, dinamisnya perkembangan sosial dan politik global, ketegasan dan komitmen aktor dalam Konvensi CITES khususnya dalam pengambilan keputusan, serta dimensi temporal yang berkaitan dengan pelaksanaan CITES. Berdasarkan penyebab terbentuknya pola tersebut, peneliti merekomendasikan lima strategi prioritas penguatan kerjasama penanganan perdagangan ilegal trenggiling melalui skema kerjasama CITES, yakni penguatan kemitraan Indonesia dan Tiongkok untuk pengelolaan dan pengawasan perdagangan ilegal flora dan fauna liar, penguatan implementasi dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan, peningkatan kapasitas penyidik sipil dan lembaga peradilan, peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah, dan peningkatan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang peraturan perundangan, pengenalan jenis dilindungi, dan nilai manfaat keanekaragaman hayati.

Kata Kunci: Kepatuhan, CITES, Perdagangan Ilegal, Trenggiling

ABSTRACT

Indonesia is home to one of the world's pangolins species whose status is protected internationally in the IUCN red list category. This means that pangolins fall into the category of vulnerable to extinction and are outlawed from being freely traded. However, the number of pangolins in Indonesia has declined due to the threat of poaching and illegal trade. In response to the threat of pangolin extinction in Indonesia, Indonesia ratified CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Unfortunately, although it has been ratified and implemented in Indonesia, the facts reveal that from 2015 to 2018, the flow of illegal pangolin trade still occurred between Indonesia and China. This study aims to analyze the pattern of Indonesia's compliance with CITES in handling cases of illegal pangolin trade between Indonesia and China. For this reason, the researcher used the explanative type in qualitative methods and used Robert M. Mitchell and Abraham Chayes's Compliance Theory analysis. The results obtained from this study are the conditions of illegal pangolin trade in Indonesia can be categorized as low compliance and low effectiveness pattern. The pattern was formed due to internal factors that included state limitations in strengthening law enforcement regulations, the capacity of the state apparatus, and limited equipment resources to monitor and identify the findings of illegal pangolin trade. Furthermore, there are also external factors that include ambiguity in the CITES, dynamic global political and social development, the firmness and commitment of actors in the CITES; especially in decision making, as well as the temporal dimensions related to the implementation of CITES. Based on the cause of this pattern, the researcher recommend five priority strategies to strengthen cooperation in handling illegal pangolin trade through the CITES cooperation scheme, namely strengthening the partnership between Indonesia and China for the management and supervision of illegal trade in wild flora and fauna; strengthening implementation and improvement of various laws and regulations; increasing civil investigator and judicial institutions capacity; increasing coordination and cooperation of related agencies in supervision and law enforcement up to the regional level; as well as increasing public awareness through socialization and campaigns on regulations, introduction of protected species, and the value of biodiversity benefits.

Keywords: CITES, Compliance, Illegal Trade, Pangolin